



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, perlu adanya mekanisme pelaksanaannya yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6618);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 05);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| KEDUA | : | Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none">a. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;b. Standar Operasional Prosedur Non Perizinan;c. Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Pengaduan, Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal;d. Standar Operasional Prosedur Perencanaan, Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal; dane. Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan. |

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANDUNG

DAFTAR IZIN

No	Nama SOP	No	SOP
1	Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	SOP Pelayanan Administrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
		2	SOP Standar Laik Fungsi (SLF)
		3	Sop Pelayanan Administrasi Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		4	SOP Perizinan Berusaha Sektor Koperasi Risiko Tinggi
		5	SOP Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan Risiko Tinggi
		6	SOP Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Risiko Tinggi
		7	SOP Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Risiko Menengah Tinggi
		8	SOP Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU)
		9	SOP Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Risiko Tinggi
		10	SOP Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Risiko Menengah Tinggi
		11	SOP Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Risiko Tinggi
		12	SOP Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Risiko Menengah Tinggi
		13	SOP Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan Risiko Menengah Tinggi
		14	SOP Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Risiko Tinggi
		15	SOP Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Risiko Menengah Tinggi
		16	SOP Perizinan Berusaha Sektor Transportasi Risiko Menengah Tinggi
		17	SOP Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Berusaha
2	Standar Operasional Prosedur Non Perizinan	18	SOP Salinan Izin Mendirikan Bangunan Terbit Sebelum Agustus Tahun 2015
		19	SOP Splitzing Izin Mendirikan Bangunan 2008 – Agustus 2015
		20	SOP Splitzing Izin Mendirikan Bangunan September 2015-2021

	21	SOP Izin Mendirikan Bangunan Salinan diatas Tahun 2015
	22	SOP Revisi Izin Mendirikan Bangunan
	23	SOP Revisi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
	24	SOP Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan)
	25	SOP Izin Praktik Dokter Hewan
	26	SOP izin Paramedik Veteriner
	27	SOP Perizinan Optometris
	28	SOP Perizinan Praktik Mandiri Dokter Gigi Spesialis
	29	SOP Perizinan Dokter Umum
	30	SOP Perizinan Perawat
	31	SOP Perizinan Tenaga Teknis Kefarmasian
	32	SOP Perizinan Praktik Teknisi Kardiovaskuler
	33	SOP Perizinan Dokter Gigi
	34	SOP Perizinan Okupasi Terapis
	35	SOP Perizinan Praktik Mandiri Okupasi Terapis
	36	SOP Perizinan Penata Anestesi
	37	SOP Perizinan Bidan
	38	SOP Perizinan Praktik Mandiri Ortotis Prostetis
	39	SOP Perizinan Refraksionis Optisien
	40	SOP Perizinan Praktik Mandiri Fisioterapis
	41	SOP Perizinan Terapis Wicara
	42	SOP Perizinan Teknisi Gigi
	43	SOP Perizinan Praktik Mandiri Tenaga Gizi
	44	SOP Perizinan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
	45	SOP Perizinan Praktik Mandiri Terapis Wicara
	46	SOP Perizinan Praktik Mandiri Dokter Umum
	47	SOP Perizinan Psikologi Klinis
	48	SOP Perizinan Praktik Mandiri Dokter Gigi
	49	SOP Perizinan Praktik Mandiri Psikolog Klinis
	50	SOP Perizinan Praktik Mandiri Bidan
	51	SOP Perizinan Apoteker
	52	SOP Perizinan Dokter Spesialis
	53	SOP Perizinan Fisioterapis
	54	SOP Perizinan Radiografer
	55	SOP Perizinan Dokter Gigi Spesialis
	56	SOP Perizinan Tenaga Gizi
	57	SOP Perizinan Ahli Teknologi Laboratorium Medik
	58	SOP Perizinan Ortotis Prostetis
	59	SOP Perizinan Terapis Gigi dan Mulut
	60	SOP Perizinan Perekam Medis

	61	SOP Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental Di Fasilitas Kesehatan
	62	SOP Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental Mandiri
	63	SOP Perizinan Program Pendidikan Dokter Spesialis
	64	SOP Perizinan Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut
	65	SOP Perizinan Praktik Mandiri Dokter Internsip
	66	SOP Perizinan Praktik Mandiri Perawat
	67	SOP Perizinan Sanitarian
	68	SOP Perizinan Praktik Mandiri Dokter Spesialis
	69	SOP Perizinan Praktik Akupunktur Terapis
	70	SOP Perizinan Tukang Gigi
	71	SOP Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
	72	SOP Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
	73	SOP Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
	74	SOP Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Informasi (PNFI)
	75	SOP Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar-Sekolah Dasar (SD)
	76	SOP Perizinan Klinik
	77	SOP Perizinan Operasional Rumah Sakit (Pemerintah Non BLU dan BLUD)
	78	SOP Izin Pusat Kesehatan Masyarakat
	79	SOP Perizinan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
	80	SOP Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	81	SOP Izin Elektromedis
	82	SOP Izin Sertifikat Laik Hygiene (Pemerintah)
	83	SOP Pencabutan
	84	SOP Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Non Videotron dengan ukuran lebih kecil dari atau sama dengan 5m ²
	85	SOP IZIN Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Videotron (Bangunan, Halaman, Taman, Jembatan, Jembatan Kereta Api, Shelter dan Jalan Tol)
	86	SOP Izin Penyelenggaraan Reklame Kendaraan
	87	SOP Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil di Halaman (PERSIL) dan di Bangunan

		88	SOP Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen NON Videotron (Bangunan, Halaman, Taman, Jembatan, Jembatan Kereta Api, Shelter dan Jalan Tol) dengan ukuran lebih besar dari 5m ²
		89	SOP Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
		90	SOP Izin Penyelenggaraan Reklame di Dalam ruangan (Indoor)
		91	SOP Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek
		92	SOP Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Berusaha
3	Standar Operasional Prosedur Perencanaan, Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal	93	SOP Prosedur Kerja Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi
		94	SOP Pameran Penanaman Modal dan PTSP di Dalam Negeri dan Luar Negeri
		95	SOP Kegiatan Event Investasi Penanaman Modal dan PTSP
		96	SOP Publikasi (Sosialisasi) Penanaman Modal dan PTSP
		97	SOP Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha Perorangan Dengan Resiko Rendah Melalui Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan (SAKEDAP) Drive Thru
		98	SOP Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha Perorangan Dengan Resiko Rendah Melalui Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan (SAKEDAP) Mobil Keliling
		99	SOP Standar Operasional Prosedur Pelayanan Berbantuan OSS-RBA Secara Virtual/Dalam Jaringan
		100	SOP Standar Operasional Prosedur Pelayanan Berbantuan OSS-RBA Secara Melalui Tatap Muka/Diluar Jaringan
4	Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan	101	SOP Surat Masuk Online
		102	SOP Surat Keluar Online
		103	SOP Legalisir
		104	SOP Pengajuan Cuti Pegawai
		105	SOP Pengajuan Kartu Istri/Suami
		106	SOP Pengajuan Pensiun
		107	SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
		108	SOP Pengajuan Kartu Pegawai
		109	SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
		110	SOP Pengajuan Tabungan Pensiun
		111	SOP Pengajuan Satya Lencana
		112	SOP Pengajuan Izin Belajar
		113	SOP Pengajuan Tugas Belajar
		114	SOP Pengajuan Pencantuman Gelar
		115	SOP Pengajuan Pemberkasan PNS
		116	SOP Penyusunan RENSTRA

		117	SOP Penyusunan Rencana Kerja
		118	SOP Penyusunan LKIP
		119	SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sebelum Riview/Sebelum Audited
		120	SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
		121	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
		122	SOP Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan
		123	SOP Penyusunan LKPJ
		124	SOP Pengajuan GAJI DAN TPP
		125	SOP Pencairan UP
		126	SOP Pencairan GU
		127	SOP Pencairan GU NIHIL
		128	SOP Pencairan TU
		129	SOP Pencairan TU NIHIL
		130	SOP Pencairan LS
		131	SOP Cek Legalitas Izin
		132	SOP Perubahan Data Perizinan
		133	SOP Peminjaman Arsip Perizinan External
		134	SOP Peminjaman Arsip Perizinan Internal
		135	SOP Penayangan Informasi Kehumasan
		136	Sop pelayanan permohonan informasi publik Offline
		137	Sop pelayanan permohonan informasi publik Online
		138	Sop Fasilitasi Penerimaan Misi Dan Kunjungan Kerja Ke Dpmpstsp Dan Mal Pelayanan Publik
		139	SOP Mal Pelayanan Publik
5	Standar Operasional Prosedur Data Informasi dan Pengaduan Masyarakat	140	SOP Tindak Lanjut Pengaduan
		141	SOP Penerimaan Pengaduan
6	Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Pembinaan Penanaman Modal	142	SOP Identifikasi Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
		143	SOP Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
		144	SOP Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
		145	SOP Laporan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
		146	SOP Analisa Data / Informasi Pelaku Usaha

		147	SOP Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis
		148	SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
		149	SOP Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis
		150	SOP Rapat Persiapan
		151	SOP Analisa dan Verifikasi Profile, Data dan Informasi Pelaku Usaha
		152	SOP Pengawasan Rutin Penanaman Modal
		153	SOP Rapat Evaluasi Kepatuhan Perizinan Berusaha
		154	SOP Pengawasan Insidental Penanaman Modal
		155	SOP Laporan Hasil Pengawasan
7	Standar Operasional Prosedur Bidang Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital	156	SOP Izin Ortotis Prostetik Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		157	SOP Izin Praktik Mandiri Fisioterapis Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		158	SOP Izin Dokter Gigi Spesialis Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		159	SOP Izin Praktik Mandiri Tenaga Gizi Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		160	SOP Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		161	SOP Izin Apoteker melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		162	SOP Izin Teknisi Gigi Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		163	SOP Izin Tenaga Teknis Kefarmasian Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		164	SOP Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		165	SOP Izin Elektromedis Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		166	SOP Izin Fisioterapis Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		167	SOP Izin Penata Anastesi Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
		168	SOP Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional

	169	SOP Izin Praktik Mandiri Terapis Wicara Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	170	SOP Izin Praktik Mandiri perawat melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	171	SOP Izin Teknisi Kardiovaskuler Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	172	SOP Izin Praktik Mandiri Psikolog Klinis melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	173	SOP Izin Refraksionis Optisien Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	174	SOP Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional jamu melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	175	SOP Izin Bidan Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	176	SOP Izin Radiografer melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	177	SOP Izin Tenaga Gizi melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	178	SOP Izin Praktik Mandiri Dokter Umum Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	179	SOP Izin Sanitarian melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	180	SOP Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	181	SOP Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	182	SOP Izin Dokter Gigi melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	183	SOP Izin Psikologi Klinis Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	184	SOP Izin Okupasi Terapis melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	185	SOP Izin Perawat Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	186	SOP Izin Praktik Mandiri Bidan Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	187	SOP Izin Optometris melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional

	188	SOP Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi Spesial Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	189	SOP Izin Perekam Medis melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	190	SOP Izin Praktik Mandiri Okupasi Terapis Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	191	SOP Izin Praktik Mandiri Ortotis Prostetis Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	192	SOP Izin Praktik Akupuntur Terapis melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	193	SOP Izin Praktik Mandiri Akupuntur Terapis melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	194	SOP Izin Dokter umum melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	195	SOP Izin Dokter Spesialis melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	196	SOP Izin Terapis Gigi dan Mulut Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	197	SOP Izin Terapis Wicara Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional
	198	SOP Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu Melalui Aplikasi MPPD (Mall Pelayanan Publik Digitalisasi) Nasional

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002